

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT BERSPEKTIF GENDER DI KOTA SEMARANG**

Oleh:

Teguh Rahmat Saleh, Ari Subowo, Dewi Rostyaningsih\*)

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*Implementation of Empowerment programs implemented by the Government of Semarang through the Integrated Program for Community Empowerment Gender-Based (P2MBG) encountered some resistance among communication factors, resources, characteristics of the implementing agency and culture so that the inhibiting factors must be addressed.*

*Keywords: Program Implementation, Community Empowerment, Gender.*

**ABSTRAKSI**

Implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG) mengalami beberapa hambatan di antaranya faktor komunikasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana dan budaya sehingga faktor penghambat tersebut harus segera dibenahi.

*Keywords : Implementasi Program ,Pemberdayaan Masyarakat, Gender.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki dibedakan sejak lahir secara biologis yang bersifat universal. Perbedaan ini menjadi kegiatan feminitas dan maskulinitas yang terstruktur dalam kultur yang sifatnya beragam dari satu etnik, suku, atau kelompok satu sama lain atau disebut dengan gender. Kemudian muncul bias gender.

Dalam aktivitas ekonomi, kerja dan usaha senantiasa beririsan ketat dengan kehidupan kaum perempuan. Sepanjang sejarah, wanita di samping memiliki pekerjaan rumah tangga juga kerap bermitra dengan laki-laki dalam kegiatan-kegiatan seperti bertani dan beternak. Dewasa ini, partisipasi wanita dalam perekonomian dan pekerjaan ekonomi di luar rumah merupakan salah satu permasalahan penting menyangkut kaum perempuan yang mencuat di tengah masyarakat. Kaum perempuan memiliki sejumlah potensi, kalau dikelola secara baik potensi itu akan memberi manfaat yang besar. Dalam banyak bidang perempuan belum berperan maksimal. Padahal jumlah kaum perempuan jauh lebih besar, namun partisipasi dan peran aktifnya masih sangat sedikit di bidang pekerjaan.

Pada rentang tahun 1984-1998 Pemerintah mengeluarkan sebuah program yang sangat baik yaitu Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS). Program Terpadu P2W-KSS telah berjalan cukup lama, akan tetapi program tersebut masih kurang optimal. Kekurangan dari program tersebut adalah pertama tidak adanya tindak lanjut dari program tersebut. Kedua adalah pada sasaran dari program tersebut. Dalam Program Terpadu P2W-KSS yang menjadi sasarannya adalah perempuan dan hanya memfokuskan pada persoalan perempuan, serta kurang mempersoalkan kedudukan perempuan di dalam keluarga. Ketiga adalah karakteristik

dari program tersebut yang menggunakan pendekatan *top-down*.

Kemudian dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, maka strategi P2W-KSS juga mengalami perubahan. Dengan adanya Inpres tersebut, maka untuk mengembangkan Program Terpadu P2W-KSS diperlukan pendekatan dan metode yang lebih sensitif gender. Oleh karena itu sasaran dari Program Terpadu P2W-KSS lebih diperluas yaitu masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selain itu untuk melakukan pengentasan kemiskinan diperlukan sebuah program yang sifatnya memberdayakan masyarakat dan kegiatan berkelanjutan.

Untuk itulah pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah nama Program Terpadu P2W-KSS menjadi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan untuk semua Pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah untuk melaksanakan program tersebut. Salah satu Kota yang melaksanakan Program Terpadu P2M-BG adalah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Semarang tidak seluruhnya mengikuti prosedur pelaksanaan. Dalam prosedur pelaksanaan tersebut meliputi tahapan pemilihan lokasi, tahapan pemilihan masyarakat mitra, tahapan pengorganisasian dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

### B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender di Kota Semarang apakah sudah berjalan optimal atau belum.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender di Kota Semarang.

## C. Teori

### 1. Kebijakan Publik

Charles O. Jones mengatakan bahwa istilah kebijakan (*Policy Term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan *grand design* (Winarno, 2002 : 14). Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan semacam ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Proses perjalanan kebijakan publik mencakup beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2004) adalah (1) Penyusunan Agenda (2) Formulasi Kebijakan (3) Adopsi/ legitimasi Kebijakan dan (4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

### 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino, 2012:138), mengatakan bahwa Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya

mengenaikan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Pendapat lainnya yang di sampaikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

### 3. Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender. Strategi ini

merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender. Pelaksanaan dan implementasi PUG juga didukung oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan UU Nomor 7 tahun 1985 mengenai segala bentuk diskriminasi.

#### **D. Metode**

1. Desain Penelitian  
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif
2. Fokus dan Lokus Penelitian  
Pada penelitian ini fokusnya adalah implementasi program pemberdayaan sedangkan lokusnya adalah Bapermasper & KB Kota Semarang.
3. Informan  
Penelitian ini menggunakan *teknik snowball sampling*. Dimana *key person* nya adalah Kepala Bapermasper & KB Kota Semarang dengan tambahan informannya adalah:
  - 3.1 Ketua Pelaksana Program P2MBG.
  - 3.2 Anggota Pelaksana Program P2MBG
  - 3.3 Ketua Tim Pendata
  - 3.4 Masyarakat Mitra
4. Fenomena Penelitian  
Fenomena yang ingin diteliti adalah prosedur dalam Implementasi (P2MBG) sebagaimana mestinya. Langkah-langkah prosedural yang dimaksud yaitu pemilihan lokasi, pemilihan masyarakat mitra, pengorganisasian, tahapan realisasi kegiatan. Adapun lokasi penelitian akan difokuskan di Kota Semarang. Penelitian ini juga akan mengamati faktor penghambat Implementasi P2MBG tersebut.
5. Jenis Data dan Sumber Data  
Penelitian ini menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau

mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010: 20). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung atau observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam. Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan daribuku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :
  1. Interview (wawancara)
  2. Dokumentasi
  3. Studi pustaka
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
  1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
  2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
  3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

#### **ISI DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi**

##### **1. Tujuan dan Sasaran**

P2MBG di Kota Semarang merujuk pada sebuah dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 mengenai Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta di lengkapi Keputusan Walikota Semarang Nomor 410/370 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang tahun 2010.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh James E. Anderson (dalam Islamy, 2007 : 19) yang mengatakan bahwa 'kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah'. James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Dimana tujuan P2MBG tersebut adalah untuk mengembangkan kualitas kehidupan keluarga sehat dan sejahtera kemudian meningkatkan pemerataan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap mental masyarakat serta member pelusng kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya melalui keterampilan produksi dan pemasaran. Selain itu juga di harapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sasaran dari P2MBG adalah masyarakat pra-sejahtera yang di data oleh tim pendata yang keanggotaannya di ambil dari perangkat kelurahan dan ketua RT/RW setempat yang mengetahui secara langsung kehidupan sehari-hari mereka.

## **2. Aktivitas dalam mencapai tujuan**

Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan P2MBG di Kota Semarang adalah Petunjuk Teknis. Dimana dalam Petunjuk Teknis tersebut berisi tentang tujuan, masukan dan output yang harus dicapai dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut selama tiga tahun.

Adapun dalam lampiran Keputusan Walikota Semarang Nomor 410/00278 Tanggal 16 Juli 2010 tentang lokasi kegiatan P2MBG Kota Semarang dari tahun 2011

sampai 2013 yaitu pada tahun 2011 lokasinya berada di Kecamatan Semarang Barat kemudian kelurannya dipilih kelurahan Ngemplak Simongan dan Gisikdrono dan Kecamatan Tembalang dengan kelurahan Tandang dan Sendangguwo. Kegiatan pada tahun 2012 dilaksanakan di Kecamatan Gunungpati dengan konsentrasi di kelurahan Cepoko Sumurejo. Setelah terlaksana disana kemudian tim pelaksana berpindah tempat ke Kecamatan Ngaliyan wilayah kelurahan Wates dan Beringin. Kemudian pada tahun ketiga atau tepatnya tahun 2013 pelaksanaanya dilakukan di Kecamatan Tugu dengan wilayah Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan serta Kecamatan Candisari yang mencakup Kelurahan Candi dan Tegalsari.

Pada awal kegiatan P2MBG yaitu langkah pertama pertama kali yaitu melakukan penyusunan data. Dalam pelaksanaan penunjukkan dan pendataan masyarakat mitra, masing-masing petugas pendata menggunakan cara-cara yang berbeda. Pendataan misalnya hanya melihat kartu keluarganya saja atau pendataan melalui komunikasi langsung ada juga penunjukan menjadi masyarakat mitra berdasarkan karena sudah tau kondisi keluarga tersebut.

Setelah dilakukan pendataan masyarakat mitra, maka hasil pendataan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana Kelurahan yaitu TP.PKK. Setelah laporan tersebut diserahkan, kegiatan selanjutnya adalah pembahasan data dasar tersebut. Pembahasan ini melibatkan para Ketua RT, Ketua RW, serta Tim Pelaksana Kelurahan. Dari musyarah tersebut ditetapkanlah masyarakat yang benar-benar pra-sejahtera menjadi masyarakat mitra. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan fasilitator dan tim pelaksana. Dalam pelatihan tersebut calon fasilitator dan calon pelaksana diajarkan tentang teknik-teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Materi yang disampaikan pada waktu pelatihan tersebut meliputi pelajaran tentang menjadi

fasilitator, langkah-langkah PRA, prinsip PRA. Selanjutnya fasilitator dan tim pelaksana di tingkat kota yang telah mendapatkan pelatihan tersebut melakukan pelatihan kepada masyarakat mitra dan tokoh masyarakat baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat RW. Pelatihan-pelatihan ini diisi oleh narasumber yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pendampingan seperti dari KOMPASS.

Setelah melakukan pelatihan dan seminar-seminar di kelurahan-kelurahan yang menjadi pusat kegiatan maka dihasilkanlah kelompok-kelompok usaha yang selanjutnya di bimbing oleh dinas Tenaga Kerja untuk dilatih pemahaman mereka tentang kewirausahaan sehingga diharapkan mampu menjadi kelompok usaha yang mandiri. Pembentukan dan pembinaan dilakukan dari awal kegiatan yaitu tahun 2011 sampai 2013 kemudian setelah tahun 2013 proses pembinaan dan pelatihan selesai maka kelompok usaha tersebut diharapkan telah siap menjadi kelompok usaha mandiri. Kelompok-kelompok ini yang bertahan di persilahkan mengajukan proposal kegiatan usaha ke Bapermas Kota Semarang untuk memperoleh dana operasional dari Bapermas sendiri menyediakan dana Rp. 2.000.000 untuk setiap kelompok usaha. Selain dari Bapermas sendiri, pendanaan juga di sediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Bapermades Pemprov Jateng dengan nominal yang berbeda-beda.

### **3. Aktor yang Terlibat**

Aktor yang terlibat dalam implementasi atau dalam pelaksanaan P2MBG di Kota Semarang terdapat beberapa pihak yang terlibat agar implementasi pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya pertama tentu saja dari Bapermas sebagai pihak pengelola program. Kemudian setelah itu Bapermas membentuk tim pelaksana yang terdiri dari anggota Bapermas sendiri yang kemudian nantinya di bantu oleh TP PKK.

Terkait dalam pelaksanaan P2MBG yang dilakukan oleh Bapermas juga melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Kota Semarang dan Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang sebagai narasumber dan pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya tim pelaksana yang di bentuk berasal dari anggota Bapermas itu sendiri dan pendataan serta penunjukan peserta Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif gender di lakukan oleh warga yang mengetahui kondisi masyarakatnya sendiri seperti ketua-ketua RT dan RW.

Van Meter dan Van Horn dalam Analisis Kebijakan Publik (Drs. AG. Subarsono, M.si., MA) juga mengatakan bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Sehingga dalam pelaksanaan (P2MBG) di Kota Semarang dapat dikatakan belum maksimal karena belum adanya koordinasi yang berjalan antar instansi secara maksimal.

## **B. Faktor Penghambat**

### **1. Komunikasi**

Upaya yang dilakukan mengenai P2MBG pertama melakukan pendataan-pendataan Masyarakat pra-sejahtera kemudian selanjutnya masuk ketahap sosialisasi dan penyuluhan. Baru setelah itu dilakukan seminar dan pelatihan dengan tindakan pendampingan. Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah Daerah atau Bapermas sebagai pengelola dan pelaksana lebih mudah untuk mengkomunikasikan tujuan dari kebijakan tersebut melalui pendekatan-pendekatan langsung kepada masyarakat.

Dalam proses penunjukan dan pendataan masyarakat mitra masih kurang komunikasi kepada masyarakat mitra itu sendiri dan masih ada beberapa petugas pendata yang hanya

melihat keadaan masyarakat mitra secara umum. Namun dapat dikatakan bahwa pemilihan masyarakat mitra sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Di dalam pedoman pelaksanaan disebutkan bahwa masyarakat mitra yang dipilih menjadi subyek dalam P2M-BG adalah keluarga inti (terdiri dari suami, istri, dan anak) termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan kriterianya ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ada di Kelurahan Lokasi P2M-BG.

Masih minimnya tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap keseluruhan program yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait berupa sosialisasi dan penyuluhan maka dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Padahal menurut George C. Edward III mengatakan bahwa salah satu variabel yang menentukan keberhasilan dalam implementasi adalah komunikasi. yaitu tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Meskipun masyarakat pra-sejahtera di Kota Semarang mengetahui tujuan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan mereka juga merupakan sasaran dari kebijakan tersebut tetapi karena ketidakpedulian dan minimnya tanggapan yang diberikan membuat komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena belum terjalannya komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat.

## **2. Sumber Daya**

Menurut George C. Edwards III dalam Dasar-dasar Kebijakan Publik, Leo Agustino S.Sos., M.Si mengatakan bahwa kompetensi implementor merupakan penentu apakah

kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Namun dalam proses sosialisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender ini masih banyak ditemui hambatan.

Anggaran merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender. Melihat banyaknya jumlah masyarakat pra-sejahtera yang harus di sejahterakan atau di entaskan maka dibutuhkan dana yang besar untuk bisa merealisasikan program pemberdayaan tersebut. Pemerintah Kota Semarang khususnya Bapermas sebagai pengelola dan pelaksana program pemberdayaan tersebut sendiri tidak memiliki anggaran yang besar untuk mengalokasikan dana terhadap program pengentasan kemiskinan apalagi program berbasis gender.

## **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender juga bergantung pada komitmen yang ada dari masing-masing unit kerja serta masyarakat agar program pemberdayaan tersebut bisa terwujud. Dalam hal komitmen sebagian besar unit kerja sudah ada. Namun masih rendahnya komitmen justru terlihat dari masyarakat di lokasi pelaksanaan setempat. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan program pemberdayaan tersebut tidak dapat berjalan jika hanya terjadi satu arah karena masih kurang kesadaran masyarakat untuk ikut mensukseskan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender ini.

## **4. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi perekonomian masyarakat mitra yang disajikan ini mencakup ruang lingkup dan definisi dan masing-masing sektor dan sub sektor yang berperan secara dominan yang akan di jelaskan sebagai berikut :

- **Sektor Pertanian**

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti, padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang hijau, dan tanaman pangan lainnya

- **Peternakan**

Sub Sektor ini mencakupn produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil -hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba, telur dan susu segar.

- **Kehutanan**

Sub sektor kehutanan mencakup tiga jenis kegiatan seperti penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa kulit kayu, kopal, akar-akaran dan sebagainya

- **Perikanan**

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil kegiatan perikanan laut, per-airan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi Program Terpadu P2M-BG di Kota Semarang dari tahun 2011 sampai 2013 masih belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan menjadikan program ini berjalan kurang optimal. Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses implementasinya yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang terjalin tidak berjalan baik hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mitra tentang Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat

Berspektif gender tersebut. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat mitra tidak memperoleh informasi.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan maupun sumber daya financial juga kurang dalam suksesnya program ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga penyuluh program dan pendamping masyarakat mitra yang jumlahnya tidak sesuai harapan. Pendamping untuk kelompok masyarakat mitra hanya terdiri dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian sumber daya financial ada dana yang tersedia untuk setiap kelompok masyarakat mitra juga tidak banyak untuk memulai sebuah kelompok usaha

#### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Untuk kegiatan identifikasi masyarakat mitra yang dilakukan tim Pendata sebagai agen pelaksana masih kurang optimal dan salah sasaran. Hal ini disebabkan karena beberapa petugas pendata masih kurang memahami dan hanya memandang keadaan masyarakat mitra secara umum dengan hanya melihat Kartu Keluarganya saja tanpa mengadakan survey ke rumah-rumah masyarakat. Komitmen Agen Pelaksana juga kurang terlihat dengan indikasi kurangnya sosialisasi yang intens dan pendampingan yang memadai.

#### **4. Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Sikap calon masyarakat mitra juga banyak yang tidak mendukung kegiatan ini, dikarenakan keengganan mereka untuk berpartisipasi dalam mengurus sesuatu yang menurut mereka merepotkan. Anggapan mengurus rumah tangga sudah begitu berat bagaimana lagi kalau di tambah mengurus di luar itu. Kemudian faktor ekonomi harusnya menjadi motivasi mereka untuk ikut pemberdayaan ini malah dijadikan alasan untuk tidak berpartisipasi karena harus



mencari kerja atau bekerja di tempat yang menjamin penghasilan. Mereka beranggapan kalau membentuk kelompok usaha belum tentu berpenghasilan sebanding dengan kerja di pabrik atau di kantor.

## **B. Saran**

### **1. Komunikasi**

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam P2MBG di Kota Semarang disebabkan oleh penyampaian informasi tentang program tersebut tidak berjalan lancar. Kurang intensifnya pelaksana kegiatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan informasi tersebut tidak dapat difahami dengan baik oleh calon masyarakat mitra. partisipasi masyarakat tersebut disebabkan ketidaktahuan terhadap informasi dan makna dari program tersebut. Hal ini sebenarnya bisa diatasi saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi program. Saran untuk perbaikan komunikasi ini yaitu diadakannya pelatihan dan edukasi-edukasi yang tepat kepada tim pendata dan tim promosi program seperti kepada ketua-ketua RT maupun Ketua-ketua RW yang lebih sering melakukan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat agar informasi program P2MBG ini dapat di sampaikan secara jelas makna dan tujuan pemberdayaan dan bagaimana nantinya tujuan program tersebut akan di capai. Masyarakat Kota Semarang sendiri sudah sangat terbuka dengan informasi sehingga sangat mungkin bahwa informasi yang jelas akan dapat meningkatkan minat mereka dalam berpartisipasi.

### **2. Sumber Daya**

Jumlah modal awal sebesar Rp. 2.000.000 di anggap cukup kecil oleh masyarakat mitra untuk membentuk suatu kegiatan wirausaha apalagi usaha itu nantinya akan dikelola oleh sekelompok orang. Harusnya pemberian modal tersebut disesuaikan dengan proposal pengajuan usaha. Walaupun pihak Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki anggaran yang cukup dalam penambahan modal tersebut diharapkan Pemerintah Kota semarang mau

dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan profit yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program pemberdayaan. Dalam hal ini juga pemerintah melalui Bapemas & KB diharapkan mampu meyakinkan pihak-pihak swasta atau perusahaan-perusahaan profit mau memfasilitasi dan memberi tambahan modal dalam membentuk kelompok usaha.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pembekalan dan pelatihan kewirausahaan maupun pembekalan dan pelatihan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan harus di tingkatkan lagi durasinya sehingga pemahaman masyarakat mitra yang mengikuti P2MBG dapat meningkat.

Peningkatan keterampilan dan pemahaman masyarakat mitra sendiri juga dapat meningkatkan persentase keberhasilan suatu kegiatan yang akan mereka lakukan. Hal ini tentu akan mempercepat tercapainya tujuan dari P2MBG. Penambahan tim pelaksana kegiatan juga harus di pertimbangkan karena program ini membutuhkan tenaga pelaksana dan pendampingan yang cukup banyak agar program tersebut berjalan lancar. Penambahan jumlah tim pelaksana bisa di rekrut dari sukarelawan dari lembaga swadaya masyarakat maupun aktivis-aktivis mahasiswa yang bergerak di bidang pemberdayaan.

### **4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Pengawasan terhadap implementasi Program terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender perlu di tingkatkan lagi. Penghasilah peserta program atau masyarakat mitra terus benar- benar di tingkatkan agar pendapatan mereka dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka sehingga status sosial juga dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan dan pendampingan yang intensif dalam pelaksanaan program P2MBG ini baik itu pengawasan dan

pendampingan kegiatan kelompok usaha akan menjadikan masyarakat mitra tidak merasa di tinggalkan dan mereka juga akan mendapat edukasi selama proses pembentukan kelompok usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dwidjowijoyo, Riant Nugroho, 2007, *Analisis Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Ekowati,Mas Roro lilik, 2009, *Perencanaan,Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta : Pustaka Cakra

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: CIDES

Moleong, Lexy J, Dr., MA. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif, 2008, *Perencanaan Partisipasi Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT Grasindo.

Ritonga, Irwan Taufiq, 2009, *Perencanaan dan Penganggaran keuangan daerah di Indonesia*, Jogjakarta : Sekolah Pasca Sarjana UGM

Rukmini, Mimin dkk, 2006a, Editor: Buni Yani, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Jakarta.

Rukmini, Mimin dkk, 2006b, Editor: Buni Yani, *Pemenuhan HAM Pendidikan dan Kesehatan di Daerah*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2008, *Manajemen Stratejik*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press..

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Wrihatnolo, Randy dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia.

### B. Internet, Website

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.partnership.org.uk](http://www.partnership.org.uk)

[www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)